

Makalah Administrasi Publik Dan New Public Management

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan.Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasi bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep welfare state (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat.

Buku Ajar Hukum Administrasi NegaraPustaka Abadi

Secara substantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positiflainnya, baik maatun maupun hukum acaranya. Hukum Tata Usa Negara memaparkan garis besar mengenai pemerintahan definisi, tindakan, perkembangan, hingga penegakan dan perlindungan terhadap warga negara (masyarakat). Supremasi hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dimaksudkan agar penyelenggara (administrasi) negara dan para penegak hukum tidak mengabaikan ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebab, salah satu faktor utama keterpukuran proses hukum dan peradilan di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan hukum dan penegakan hukum yang acap kali mengabaikan rasa keadilan masyarakat, dan hanya terpaku pada formalitas dan , prosedur hukum semata. Manakala proses peradilan pada Hukum Tata Usaha Negara berbenturan dengan berbagai persoalan interpretasi dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, buku referensi penting ini bisa menjadi rujukan utamanya. Sangat dianjurkan untuk kalangan praktisi dan akademisi di bidang hukum dan peradilan, advokat/pengacara, aktivis LSM, para mahasiswa Hukum dan Ilmu Sosial lainnya, birokrat dan anggota legislatif, dan penting pula dipahami oleh masyarakat awam—untuk meningkatkan kesadaran hukum yang lebih baik.
Buku persembahan penerbit

PrenadaMediaGroup

Pengawasan Pelayanan Publik

Fenomena Hukum di Ruang Publik

perubahan paradigma dari administrasi negara ke administrasi publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

Administrasi publik baru Indonesia

This book is generally about public administration and particularly about new public administration, a product of the turbulent late 1960s and the 1970s.

Sejalan dengan kajian konsep pelayanan publik, buku ini dimaksudkan untuk guru-guru bidang Pendidikan Kewar-ganegaraan khususnya untuk menunjang pembelajaran pend-ikan kewarganegaraan di sekolah. Selain itu, juga untuk menunjang kompetensi pedagogik dari calon guru Pendidikan Kewarganegaraan. Buku ini juga dapat dimanfaatkan untuk para guru, instruktur dan peminat bidang Pendidikan Kewar-ganegaraan dan mata pelajaran lainnya.

Pembahasan hukum administrasi negara dalam buku ini telah disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan berbagai aturan (regulasi) yang berkaitan dengan lapangann hukum administrasi negara.

Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik

Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945

Public Administration Ethics

Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Perilaku Kebijakan Organisasi

Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 Regarding Marks and Geographical Indication = Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis This book is in English and Indonesian = Buku ini Berbahasa Inggris dan Indonesia

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat, dalam implementasinya tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya.Gencarnya upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di kabupaten/kota yang dilakukan melalui penataan daerah, dengan salah satu penekanannya melalui pemekaran daerah, dalam kenyataannya memperlihatkan bahwa pemekaran daerah cenderung gagal mewujudkan tujuan pembentukannya.Tulisan dalam buku ini mengangkat permasalahan mengapa kebijakan pemekaran daerah belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.Dengan menggunakan pemikiran New Public Service sebagai “kaca mata” utama dalam melihat masalah yang dihadapi UU tentang Pelayanan Publik, tulisan ini mengungkapkann bahwa implementasi UU Pelayanan Publik masih terkendala di dalam masalah tingkat ketepatan cara penyelenggara pelayanan publik dan belum menempatkan masyarakat pusat dari pelayanan publik. Menurut tulisan ini, keberhasilan implementasi UU Pelayanan Publik sangat bergantung kepada faktor kepemimpinan, anggaran dan kepedulian masyarakat.Tulisan ini merekomendasikan agar perlu diintensifkan pengawasan oleh DPRD kabupaten/kota terhadap pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan terhadap implementasi standar pelayanan publik harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari internal maupun eksternal. Untuk itu perlu dibentuk gugus tugas untuk memantau pelaksanaan UU tentang Kebijakan Publik, baik di DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota maupun di penyelenggara pelayanan publik di K/L dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung.

Untuk menyelesaikan praktek pungli atau pelayanan berbelit dan lambat, perlu diselesaikan melalui sistem penganggaran. Jumlah anggaran yang tidak ideal antara banyak kegiatan yang terkait pelayanan publik seperti pemberian barang, jasa, dan administrasi dengan banyaknya masyarakat yang hendak dilayani, akan terus dijadikan alasan untuk membenarkan praktek pungli.

Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengembalikan hukum sebagai norma tertinggi baik bagi warga negara maupun pemerintah. Tantangan itu bisa dijawab jika kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam buku ini, seperti apa faktor yang menyebabkan aparat administrator negara mengabaikan hukum? Mengapa terjadi perlakuan diskriminasi dalam setiap kebijakan penerapan hukum? Mengapa aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan diskresi yang kuasi ketika menerapkan pendekatan hukum? Atau akhirnya, mengapa kita mutlak harus meneggakkan negara hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan negara? Buku ini merupakan suatu upaya secara sistematis menguraikan dasar-dasar ilmu hukum administrasi negara dan mencari jawaban yang substansial bagi tegaknya materi hukum administrasi dalam negara hukum modern demokratis yang hadir dalam masyarakat. Karena itu, buku ini juga berusaha menjelaskan kesenjangan antara hukum administrasi negara sebagai sains (praktis). Pembahasan dalam buku ini dimulai dengan suatu pendahuluan yang menguraikan dasar-dasar ilmu hukum administrasi negara sebagai pengetahuan modern, komunikatif, dan kajian keilmuan hukum sebagai unsur utama secara teoritis dan menggunakan medium komunikasi keilmuan hukum, hingga menguraikan bentuk-bentuk kebijakan yang dimungkinkan oleh hukum administrasi negara dan berbagai bentuk deviasi hukum yang tolerabel dalam keadaan tertentu.

menuntut dilakukan segera tindakan penyelesaiannya secara tidak melanggar hukum Dengan demikian, tidak hanya mahasiswa fakultas hukum yang perlu membaca buku ini, tetapi juga praktisi, aparat penegak hukum dan keamanan yang memiliki peran bagi pembangunan masyarakat yang tidak hanya semakin tertib, tetapi juga semakin adil, sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Mengukap peluang dan tantangan administrasi publik

Administrasi Publik dan Inovasi Birokrasi : Sebuah Pengantar

Legal Issues Berkaitan Dengan Peradilan TUN Pasca-Reformasi

Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara

Kajian komparatif pemerintahan tiga presiden : Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Soekarnoputri

Di tengah banyaknya lembaga-lembaga pemerintah, lembaga negara maupun lembaga Independen yang dibentuk pemerintah, korupsi tetap menjadi momok yang menggerogoti lembaga-lembaga tersebut. Di mana kerap terjadi tindakan pejabat pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Persoalan bangsa ini seakan tidak diselesaikan secara serius. Padahal dalam sistem pemerintahan, kita mengenal asas umum pemerintahan yang baik, tetapi realisasinya sampai sekarang masih dapat dipertanyakan. Untuk itu, penting bagi masyarakat pada umumnya untuk mengetahui bagaimana ("secara teori") sistem pemerintahan kita ("seharusnya") berjalan. Bagaimana pula alat-alat pemerintah, badan-badan kenegaraan, dan pejabat-pejabat di negeri ini menjalankan tugasnya. Dari sinilah kemudian masyarakat dapat memahami sebenar-nya di mana letak kesalahan dari pejabat pemerintah/administrasi negara kita saat ini. Dengan bertambahnya daya kritis masyarakat akan membuat upaya kontrol rakyat terhadap pemerintah akan semakin menguat. Buku ini juga akan membahas tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pandangan untuk pengaduan ke PTUN terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Diharapkan buku ini dapat membantu ma-syarakat yang awam akan hukum untuk mampu menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan pejabat pemerintah/administrasi negara yang mengeluarkan kebijakan sewenang-wenang. Selain itu, buku ini juga bisa menjadi pegangan teori bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum. Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup

Buku Hukum Administrasi Negara ini ditulis dari pelbagai bahan literatur dan peraturan perundang-undangan yang lama dan terbaru. Disusun secara sistematis dari pokok pangkal paling dasar, yakni Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, lalu memasuki wilayah Hukum Administrasi Negara. Susunan ini sengaja digunakan untuk melihat Hukum Administrasi Negara secara lengkap dan sempurna, yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara.

Adapun tujuan dari Buku ini adalah untuk memberi wawasan yang lebih baik bagi setiap pembacanya terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Supaya lebih mengerti tentang Hukum Administrasi Negara terutama dalam hal konseptual dan teori yang dipaparkan dalam pembelajaran mata Hukum Administrasi Negara.

Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara

Antologi Administrasi Publik dan Pembangunan

Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 Regarding Marks and Geographical Indication = Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Spirit Reformasi Birokrasi Publik (Menuju one stop services system)

Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara

Ada dua perubahan besar yang terjadi di Indonesia pasca-Reformasi yang berimplikasi secara langsung terhadap Peradilan Tata Usaha Negara: pertama, pada bidang ketatanegaraan, terwujudnya tatanan demokrasi yang lebih baik, sehingga dimungkinkan pengejawantahan aspirasi-suara rakyat, antara lain melalui legislasi berbagai undang-undang yang berimplikasi langsung terhadap Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, perubahan yang terjadi akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, yang mengakibatkan makin besarnya harapan (sekaligus kontrol) oleh publik terhadap kinerja Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan access to justice melalui penanganan perkara yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Senada dengan kedua perubahan besar tersebut, buku ini terdiri atas tulisan hukum yang berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi dan tulisan yang berkaitan dengan Peradilan Elektronik (e-Court) pada Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap tulisan pada buku ini terdiri atas beberapa isu hukum, yang kesemuanya akan dibahas dan selanjutnya dipreskripsikan pada setiap akhir tulisan. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Bertitik pangkal pada niat dari hati yang paling dalam dan iktihat yang sungguh kelahiran buku yang berjudul,“Teori dan Hukum Perancangan Perda (The Turning Point of Legal Paradigm on Sustainable Regulation)” telah diselesaikan dengan baik meskipun penulis sendiri berpandangan masih banyak celah kelemahan. Namun demikian celah sebagaimana dimaksud tiada lain adalah bentuk iktihat kami dalam mengembangkan gagasan pemikiran yang diharapkan mampu menjadi pencerahan dan lokomotif pembangunan di tengah arus pasang surut politik legislasi di daerah. Dalam naskah ini tim penulis mengangkat berbagai topik menarik tentang paradigma baru analisis dan pembacaan terhadap produk hukum daerah, perencanaan Perda APBD, Perda Kabupaten Informasi Publik, Perda Keterbukaan Informasi Publik, dan Perda RTRW yang tidak hanya melihat sisi teknis legislative drafting sebagaimana amatan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan tetapi secara lebih substansial adalah berolah ilmu untuk menggali gagasan-gagasan paradigmatik sebuah produk hukum yang bersumber pada nilai-nilai universal seperti kerakyatan, keadilan, partisipasi, dan demokrasi. Nilai-nilai sebagaimana dimaksud diramu dalam perspektif pemikiran akademik dalam konteks teori sehingga dalam pembahasan bab demi bab diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi khlayak yang membacanya.

On public administration in Indonesia: collection of articles.

Administrasi negara

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIA

Beyond Borders: Communication Modernity & History

ICEHHA 2021

Banyak cara untuk memajukan ilmu hukum, termasuk menerbitkan karya tulis Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. dengan judul: Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara Tak ada yang meragukan perlunya buka senacem ini sebagai sebuah bahan acuan, pembanding, pedoman dan sumber bagi para hakim pada lingkungan peradilan dan dapat pula membantu semua pihak terutama dari kalangan akademisi, teoritis, praktisi dan lain-lainnya yang ingin lebih mendalami secara intens, detail dan terperinci tentang Yurisprudensi Tata Usaha Negara yang digunakan sebagai sarana hukum untuk pembangunan Hukum Administrasi Negara dan yurisprudensi putusan pengadilan tata usaha negara. Tema-tema sentral utama yang dibahas dalam buku ini mencakup: Kerangka Konseptual dan Pembangunan Hukum Nasional; Pemberdayaan Putusan Pengadilan dalam Pembangunan Hukum Nasional; Hukum Administrasi Negara dan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Pemberdayaan Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Pembangunan Hukum Administrasi Negara.

Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heteronom) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom). Para ahli melihat semakin pentingnya Hukum Administrasi Negara untuk menjaga tegaknya pilar negara hukum (rechtstaat dan rule of law). UUD Negara RI 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tanpa memberikan atribut rechtstaat seperti di masa lalu. Dengan demikian, meskipun secara historis Hukum Administrasi Negara di Indonesia tumbuh di atas fondasi sistem negara hukum rechtstaat, namun, dapat diisi dan dilengkapi dengan prinsip-prinsip rule of law. Substansi hukum ini memadukan konsep-konsep Hukum Administrasi Negara baik yang berkembang di atas fondasi rechtstaat di Eropa maupun di atas fondasi rule of law di Anglo Saxon.

Reforming public administration and bureaucracy of central and local government level in Indonesia; collection of articles.

Pengantar Ilmu Pemerintahan

Etika Administrasi Publik

Festschrift untuk Sjamsiar Sjamsuddin

Peluang reformasi new public management untuk kabupaten di Indonesia

bangsa rampai wacana administrasi publik

Perencanaan administrasi dibutuhkan tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh Negara-negara lainnya. Faktor-faktor, seperti semakin terbukannya pasar bebas dunia, kepentingan pasar terhadap pelayanan yang lebih profesional, kompetisi global, dan tuntutan otonomi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah regional dan local menjadi pemicu bagi perubahan system administrasi public yang ada. Gerakan reformasi administrasi sendiri di berbagai belahan dunia telah menjadi suatu gerakan massif yang dilakukan sebagai bentuk respons terhadap perubahan dinamika ekonomi, sosial, dan politik di ranah global. Sebelum lebih jauh membahas reformasi administrasi, barangkali terlebih dahulu dijelaskan secara singkat tentang administrasi dan karakteristiknya. Administrasi menurut Herbert Simon (1999 dalam Pasolung, 2010) adalah kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Siagian (2004) mendefenisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pasolung sendiri kemudian merangkum banyak definisi tentang administrasi dan menjelaskan bahwa administrasi adalah “ pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional ”

Buku ini berusaha memperkenalkan bagaimana mengetahui dan memahami proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dengan berbagai fenomena dan problematika yang terjadi. Dalam buku ini, tidak hanya mengutamakan pemahaman pada materi saja, tetapi juga menjelaskan dengan tepat secara kontekstual. Untuk itu, sifat penyajiannya lebih informatif dari pada substantif, mengingat karakteristik buku pengantar yang meletakkan dasar-dasar menuju pada pemahaman lebih lanjut tentang Ilmu Pemerintahan.

This book contains the proceedings of the First International Conference on Education, Humanities, Health, and Agriculture (ICEHHA 2021). Where held on 3rd-4th June 2021 in Ruteng, Flores, Indonesia. This conference was held by Universitas Katolik Indonsia Santu Paulus Ruteng. The papers from this conference were collected in a proceedings book entitled: Proceedings of the First International Conference on Education, Humanities, Health, and Agriculture (ICEHHA 2021). The presentation of such a multi-discipline conference will provide a lot of inspiring inputs and new knowledge on current trends in the fields of Education, Humanities, Health, and Agriculture. According to the argument, this conference will act as a valuable reference for numerous relevant research efforts in the future. The committee recognizes that the smoothness and success of this conference cannot be separated from the cooperation of numerous stakeholders. As such, we like to offer our profound gratitude to the distinguished keynote speaker, keynote speakers, invited speaker, paper presenters, and participants for their enthusiastic support of joining the First International Conference on Education, Humanities, Health, and Agriculture. We are convinced that the contents of the study from various papers are not only encouraged productive discussion among presenters and participants but also inspire further research in the respected field. We are greatly grateful for your willingness to join and share your knowledge and expertise at our conference. Your input was essential in ensuring the success of our conference. Finally, we hope that this conference will serve as a forum for learning in building togetherness, especially for academic networks and the realization of a meaningful academic atmosphere for the development of digital literacy in various fields of life. Thus, we hope to see you all at the second ICEHHA.

REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

Bunga Rampai Birokrasi (Isu-Isu Stratejik Seputar Birokrasi)

Hukum Acara dan Peradilan Elektronik

Teori dan Hukum Perancangan Perda

Parlementaria

Hukum administrasi negara adalah cabang independen dari hukum publik yang memastikan berfungsinya lembaga administrasi negara seperti yang ditetapkan dalam sumber hukum yang relevan. Selain itu, kajian hukum administrasi negara pada dasarnya akan mempelajari transformasi administrasi publik sesuai dengan perkembangan doktrin hukum administrasi (Agapova & Palkova, 2020; Gluck, 2015). Pada prosesnya, Hukum administrasi negara akan menentukan keterliban yang meliputi: 1. Efektifitas fungsi administrasi publik (public administration), 2. Melindungi individu dari kegiatan ilegal negara. 3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan administrasi publik. Dewasa kini, telah dianggap cukup rasional ketika banyak pihak mengklaim bahwa administrasi publik adalah kompleks, bahkan mekanisme publik yang paling kompleks. Administrasi dicirikan oleh sub-ordinasinya terhadap tujuan-tujuan tertentu yang ditentukan oleh para pembuat regulasi. Karena tujuan masyarakat (politik) yang termasuk dalam undang-undang terus mengalami perubahan, maka administrasi publik yang merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut harus terus beradaptasi pada setiap reformasi tersebut. Ini berarti bahwa struktur kelembagaan administrasi publik harus terus[1]menerus dibentuk, ditata ulang dengan berbagai prosedur baru yang harus ditetapkan atau prosedur yang ada harus diubah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, kunci daripada administrasi publik adalah efisiensi, akan tetapi sejauh ini hanya berhasil dicapai di atas kertas dan masih belum berjalan secara berkesinambungan (Agapova & Palkova, 2020) Hukum Administrasi Negara : Fenomena Hukum di Ruang Publik ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Hukum administrasi negara telah berkembang sejalan dengan gerak pemerintah mulai antara lain sebagai instrumen perantara. Sebagai perwujudannya, pemerintah menggunakan / melaksanakan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan keputusan-keputusan yang mengandung suatu larangan maupun berupa kebolehan (izin). Oleh karena itu, sejak awal, bahkan, sejak dahulu kala pemerintah telah terlibat atau telah menggunakan sarana hukum dalam penataan dan pengelolaan masyarakat. Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat menyebabkan pula berkembangnya tugas-tugas pemerintahan yang dapat di lihat pada berbagai bidang urusan pemerintahan telah terjadi penumpukan aturan-aturan dan keputusan-keputusan pemerintah yang saling melengkapi, bahkan dapat pula bersifat mengubah karna terjadinya perubahan situasi dan kondisi dalam masyarakat.

Constitutional law of Indonesia after amendment to the Indonesian 1945 Constitution.

Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara

The New Public Service

Serving, Not Steering

Buku Ajar Hukum Administrasi Negara

Journal desentralisasi

Bok chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Hukum Administrasi Negara. Buku ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan yang sesuai dan mudah dipahami. Sistematika buku “Hukum Administrasi Negara” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 11 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan, diantaranya: Definisi Dan Posisi Hukum Administrasi Negara; Keputusan/Ketetapan Administrasi Negara; Asas-Asas Pemerintahan; Organisasi Administrasi Negara; Sarana Dalam Melaksanakan Administrasi Negara; Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara; Peradilan Administrasi Negara; Lapangan, Sejarah dan Perkembangan Hukum Administrasi Negara; Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara; dan Hukum Administrasi Negara Yang Progresif.

Buku ini mengkaji beberapa aspek yang berhubungan dengan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik yang lebih banyak dikhususkan pelayanan one stop services system, yang diharapkan dapat memberikan implikasi positif dalam perizinan dan non perizinan. Serta sangat memberi manfaat dalam melengkapi literatur Biokrasi Publik, bagi mahasiswa program studi ilmu Ilmu Administrasi Publik maupun praktisi atau birokrat yang melaksanakan fungsi sebagai public services.

Teknologi informasi dan komunikasi dipandang sebagai sebuah alat inovatif yang diadopsi oleh pemerintah, sebagai sebuah cara untuk menjadi efisien dan efektif dalam melakukan inovasi birokrasi dan administrasi publik di pemerintahan. Buku ini membahas administrasi publik dan inovasi birokrasi yang selaras dengan perkembangan informasi teknologi dengan fokus pengembangan administrasi negara dan inovasi birokrasi dalam pemerintahan. Bagian pertama dari buku ini membahas dan menganalisis secara global pada publik administrasi dan informasi teknologi inovasi. Buku ini juga akan membahas tentang keterbukaan pemerintah, perspektif media sosial, demokrasi, dan tantangan manajemen komunikasi publik. Dalam Bab 1 akan membahas tentang keterbukaan pemerintah, yang bisa digunakan oleh sebuah demokrasi untuk memfasilitasi lebih banyak transparansi dan pemerintahan yang kolaboratif. Pada Bab 2 membahas tentang strategi administrasi publik dan evaluasi terbaik dalam penerapan inovasi birokrasi. Dalam Bab 3 menjelaskan analisis dari lintas negara dengan teknik statistik pemodelan persamaan struktural untuk menguji dampak tentang perkembangan e-government dan eksplorasi faktor hubungannya. Pada Bab 4 membahas tentang publik administrasi negara Italia menggunakan demokrasi partisipatif berbasis partisipasi online dan dilihat dengan perspektif politik kontemporer dan administrasi publik. Dalam Bab 5 menganalisa penerapan sosial media pada administrasi publik, memeriksa teori yang mendukung penggunaan dari sosial media, penggunaan utama dari teknologi untuk administrasi publik di masa depan. Pada Bab 6 membahas tentang e-government dan mempertimbangkan apakah e-government sebagai produk inovatif untuk sektor publik dan menyarankan e-government sebagai produk inovasi pengelolaan birokrasi. Di bab ini, masing-masing teori dibahas dan spekulasi dibuat untuk penyalaraan komunikasi dalam inovasi birokrasi. Dalam Bab 7 menyediakan wawasan lebih dalam terkait strategi penyalaraan teknologi informasi dan administrasi publik yang berkaitan dengan organisasi publik berdasarkan pada sebuah penilaian dari bukti-bukti empiris. Oleh karena itu, Buku ini penting untuk dijadikan suatu pengantar dalam administrasi publik, komunikasi publik dan inovasi birokrasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Proceedings of the 1st International Conference on Education, Humanities, Health and Agriculture, ICEHHA 2021, 3-4 June 2021, Ruteng, Flores, Indonesia

Hukum Lingkungan: SISTEM HUKUM PERIZINAN BERWASANA LINGKUNGAN

New Public Administration

Bebarapa catatan membangun misi reformasi birokrasi dan administrasi negara pada pemerintahan baru pasca Pemilu 2004

Hukum Administrasi Negara

Buku ini membahas Isu kebijakan semenjak perubahan era baru dalam penerapan kebijakan organisasi. Misalnya program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditandatangani oleh pemerintah pusat atau dengan kata lain sejak garis kebijakan vertikal menjadikan kebijakan program BKKBN. Termasuk isu kebijakan yang sering diberitakan bahwa sejak program BKKBN ini iotonomikan terdapat banyak pegawai dan tenaga penyuluh BKKBN yang melakukan mutasi pindah ke instansi lains ebagai dampak dari banyaknya karyawan yang melakukan mutasi umumnya adalah tenaga yang telah terlatih dan menguasai pekerjaan penyuluh BKKBN sebagai aset dalam pengembangan program kelembagaan mengalami pengurangan. Isu kebijakan program kelembagaan di era otonomi pemerintahan daerah, terdapat adanya berbagai kesenjangan (gap) dalam pelaksanaan tugas yang diemban terhadap publik, khususnya dalam pendampingan dan pemberian penyuluhan Kelembagaan di tingkat kabupaten dan kota yang ditempatkan di kecamatan dan desa. Sebelum kebijakan otonomi pemerintah daerah dalam satu kecamatan terdapat lebih dari dua orang Petugas Penyuluh Lapangan BKKBN yang mengkoordinir Penyuluh Lapangan Desa (PLD), saat ini telah ditetapkan hanya satu orang di kecamatan. Termasuk PLD BKKBN sebelum otonomi pemerintahan daerah, 1 orang PLD BKKBN menangani satu desa, tetapi saat ini 1 orang PLD BKKBN desa menangani tiga sampai empat desa, sehingga tidak efektif dalam melakukan pembinaan, pencerahan dan penyuluhan kepada publik khususnya masyarakat yang rentang dengan reproduksi. Bagi pemerintah kabupaten/kota, program kelembagaan adalah program bupati tau/walikota yang tentunya kebijakan yang dikeluarkan harus mendukung kebijakan utama yang menjadi prioritas dari bupati/walikota yang saat ini nampaknya program kelembagaan bukan lagi sebagai program prioritas, melainkan program pendukung kebijakan bupati/walikota, menjadi waja jika jumlah penduduk bertambah, kesehatan masyarakat mengalami perubahan yang stagnan dan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan, sehingga nampaknya program kelembagaan mengalami pengabaian dari program-program pemerintah yang berskala prioritas, terkalahkan dengan kebijakan program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai program kebijakan prioritas pemerintah daerah.

This widely praised work provides a framework for the many voices calling for the reaffirmation of democratic values, citizenship, and service in the public interest. The expanded edition includes an all-new chapter that addresses the practical issues of applying these ideals in actual, real-life situations. “The New Public Service, Expanded Edition” is organized around a set of seven core principles: serve citizens, not customers; seek the public interest; value citizenship and public service above entrepreneurship; think strategically, act democratically; recognize that accountability isn't simple; serve, rather than steer; and value people, not just productivity. The book asks us to think carefully and critically about what public service is, why it is important, and what values ought to guide what we do and how we do it. It celebrates what is distinctive, important and meaningful about public service and considers how we might better live up to those ideals and values. All students and serious practitioners in public administration and public policy should read this book. While debates about public policy issues will surely continue, this compact, clearly written volume provides an important framework for public service based on and fully integrated with citizen discourse and the public interest.

Studies of autonomy in Indonesia.

Reformasi administrasi